

TIGA FASE PERKEMBANGAN BAHASA INDONESIA (1928—2009): KAJIAN LINGUISTIK HISTORIS

Sudaryanto
Universitas Ahmad Dahlan
E-mail: sudaryanto82uad@gmail.com

ABSTRAK

Bahasa Indonesia mengalami tiga fase perkembangan sejak kelahirannya pada 28 Oktober 1928 hingga terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Tiga fase itu mencakup (1) bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, (2) bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, dan (3) bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Metode penelitian yang digunakan ialah analisis konten. Sumber data yang digunakan ialah buku, dokumentasi, dan foto yang merekam peristiwa bahasa Indonesia selama kurun waktu 81 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) fase bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ditandai Ejaan van Ophuijsen dan Kongres Bahasa Indonesia I, (2) fase bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara ditandai Pasal 36 UUD 1945, Kongres Bahasa Indonesia II, Praseminar Politik Bahasa Nasional (1974), Seminar Politik Bahasa Nasional (1975), Seminar Politik Bahasa (1999), Ejaan Suwandi (1947), dan Ejaan yang Disempurnakan (1972), dan (3) fase bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional ditandai Kongres Internasional IX Bahasa Indonesia, UU Nomor 24 Tahun 2009, dan Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Kata kunci: bahasa Indonesia, bahasa persatuan, bahasa negara, bahasa internasional

THREE PHASES OF INDONESIAN DEVELOPMENT (1928—2009): A HISTORICAL LINGUISTIC STUDY

ABSTRACT

Indonesian language experienced three phases of development since its birth on October 28, 1928 until the issuance of Law Number 24 Year 2009 on Flag, Language, and Symbol of the Country, and National Anthem. The three phases it covers (1) Indonesian as a language of unity, (2) Indonesian as a country language, and (3) Indonesian as an international language. Research method used is content analysis. Data sources used are books, documentation, and photographs that record Indonesian events over 81 year. The results of this study indicate that (1) the phase Indonesian as a language of unity is marked van Ophuijsen of Spelling and the Indonesian Congress I, (2) the phase

Indonesian as a country language is marked Article 36 of the 1945 Constitution, Indonesian Congress II, National Political Language Praseminar (1974), National Political Language Seminar (1975), Political Language Seminar (1999), Suwandi Spelling (1947), and Improved Spelling (1972), and (3) the phase of Indonesian as a international language marked Indonesian Congress International IX, Law Number 24 Year 2009, and the Center of Strategy Development and Linguistic Diplomacy, The Development Agency and Language Coachin.

Keywords: Indonesian, language of unity, country language, international language

PENDAHULUAN

Ki Hadjar Dewantara, tokoh pendidikan asal Perguruan Tamansiswa, Yogyakarta, mengungkapkan bahwa dasar bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu yang disesuaikan dengan pertumbuhannya dalam masyarakat Indonesia. Dengan istilah lain, bahasa Indonesia akan seirama dengan perkembangan masyarakat Indonesia dari masa ke masa. Sebagai contoh, saat diikrarkan melalui peristiwa Sumpah Pemuda (tahun 1928), bahasa Indonesia (saat itu) masih menggunakan ejaan van Ophuijsen. Setelah Indonesia merdeka, atau tepatnya tahun 1947, bahasa Indonesia menggunakan ejaan Republik atau ejaan Suwandi.

“jang dinamakan ‘Bahasa Indonesia’ jaitoe bahasa Melajoe jang soenggoehpoen pokoknja berasal dari ‘Melajoe Riau’ akan tetapi jang soedah ditambah, dioebah atau dikoerangi menoeroet keperluan zaman dan alam baharoe, hingga bahasa itoe laloe moedah dipakai oleh rakjat diseleroeh Indonesia; pembaharoean bahasa Melajoe hingga mendjadi bahasa Indonesia itoe haroes dilakoekan oleh kaoem ahli jang beralam baharoe, ialah alam kebangsaan Indonesia.”

—**Ki Hadjar Dewantara**, dalam Kongres Bahasa Indonesia I, 1938 di Solo

Gambar 1. Charles Adriaan van Ophuijsen



Gambar 2. Engku Nawawi Gelar Sutan Makmur



Menurut Kridalaksana (2011), ejaan van Ophuijsen merupakan sistem ejaan Latin untuk bahasa Melayu di Indonesia yang dimuat dalam *Kitab Logat Melajoe* (1901) oleh Charles Adriaan van Ophuijsen dan merupakan ejaan Latin resmi yang pertama di negeri ini. Buku *Kitab Logat Melajoe* disusun dengan bantuan Engku Nawawi gelar Sutan Makmur dan M. Taib Sutan Ibrahim. Sementara itu, Sudaryanto (2017) menjelaskan, ejaan Republik atau ejaan Suwandi merupakan sistem ejaan Latin untuk bahasa Indonesia sesudah Proklamasi Kemerdekaan yang dimuat dalam Surat Keputusan Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, Mr. Soewandi, No. 264/Bhg. A tanggal 19 Maret 1947 yang merupakan penyederhanaan atas Ejaan van

Ophuijsen, antara lain, adalah perubahan *oe* menjadi *u*, sistem ini menjadi ejaan resmi dari tahun 1947 sampai tahun 1972.

Jika dicermati secara saksama, perubahan dari sistem ejaan van Ophuijsen menjadi sistem ejaan Republik atau Suwandi, sesungguhnya menunjukkan adanya perkembangan fase bahasa Indonesia. Awalnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan (*language of unity*), kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara (*country language*). Selanjutnya, terbitlah Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Aturan hukum itu menjadi tonggak bagi fase ketiga, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional (lihat Pasal 44 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 24 Tahun 2009). Dengan demikian, ada tiga fase penting dalam perkembangan bahasa Indonesia.

Namun demikian, sejumlah referensi mata kuliah umum (MKU) Bahasa Indonesia yang ditulis oleh para pakar bahasa Indonesia, seperti Rohmadi dkk (2014), Mulyati (2016), Achmad H.P. & Alek (2017), dan Juanda dkk (2017) belum menguraikan tiga fase perkembangan bahasa Indonesia, khususnya rentang tahun 1928—2009. Demikian halnya dengan pakar bahasa Indonesia asal luar negeri, seperti Samuel (2008), Jones (2008), dan Paauw (2009). Ketiganya belum menguraikan pula tiga fase perkembangan bahasa Indonesia. Atas dasar itulah, penulis mengambil topik penelitian tiga fase perkembangan bahasa Indonesia (1928—2009) dalam perspektif linguistik historis.

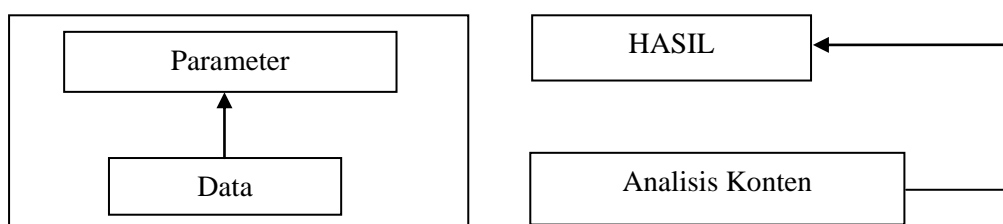
METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode analisis konten (Krippendorff, 1980). Penelitian tentang tiga fase perkembangan bahasa Indonesia

(1928—2009) pada umumnya merupakan analisis isi pesan yang tercermin dari fase-fase tersebut. Oleh karena itu, kajian ini bersifat deskriptif yang memerikan tentang fase-fase perkembangan bahasa Indonesia selama 81 tahun. Masalah fase-fase perkembangan bahasa Indonesia itu akan dianalisis dari perspektif linguistik historis.

Desain yang digunakan dalam penelitian ini yang merupakan estimasi terhadap gejala yang terdapat pada data. Pola fase perkembangan bahasa Indonesia yang akan dideskripsikan menyangkut beberapa gejala, maka parameter yang digunakan juga meliputi beberapa parameter sesuai gejala yang dideskripsikan. Jika diskemakan dapat digambarkan berikut.

Gambar 3. Skema Desain Penelitian



Pengumpulan data dilakukan dengan teknik membaca dan mencatat secara cermat fase-fase perkembangan bahasa Indonesia (1928—2009) yang dijadikan contoh melalui kartu data. Fase-fase perkembangan bahasa Indonesia diambil dari buku, dokumentasi, dan foto peristiwa-peristiwa kebahasaan. Kartu data dibagi tiga kelompok, yaitu (1) kelompok yang mendeskripsikan fase bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan (tahun 1928), (2) kelompok yang mendeskripsikan fase bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara (tahun 1945), dan (3) kelompok yang mendeskripsikan fase bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional (tahun 2009—sekarang).

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas semantik, jika data yang muncul perihal tiga fase perkembangan bahasa Indonesia (1928—2009).

Reliabilitas yang digunakan adalah reliabilitas interrater, yaitu mengonsensuskan hasil penelitian dengan pakar linguistik (bahasa Indonesia).

Data dianalisis dengan teknik analisis konten dengan prosedur (a) pencatatan, (b) reduksi data, (c) pengkategorian, dan (d) inferensi. Pencatatan dilakukan dengan kartu data. Unit data diambil dari unit kata atau kosakata yang mencerminkan tiga fase perkembangan bahasa Indonesia (1928—2009). Proses analisisnya dilakukan dengan alur (1) pemahaman atas tiga fase perkembangan bahasa Indonesia (1928—2009), (2) identifikasi tiga fase perkembangan bahasa Indonesia (1928—2009), dan (3) klasifikasi tiga fase perkembangan bahasa Indonesia (1928—2009) berdasarkan fenomena kebahasaan. Setelah klasifikasi data yang belum terstruktur, ditata dan disaring dengan membuang data-data yang kurang relevan dengan tujuan penelitian. Pada tahap inferensi, yaitu menginterpretasikan tiga fase perkembangan bahasa Indonesia (1928—2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan hasil dan pembahasan tiga fase perkembangan bahasa Indonesia (1928—2009) dilengkapi foto-foto peristiwa kebahasaan yang relevan. Secara berurutan, dibahas fase bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional.

Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan

Bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa persatuan oleh para pemuda yang mengikuti Kongres Pemuda ke-II di Batavia (kini Jakarta) pada tanggal 27—28 Oktober

1928. Saat itu, para pemuda dari berbagai organisasi daerah mengucapkan ikrar bernama Sumpah Pemuda sebagai berikut:

*Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe
bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia*

*Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe
berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia*

*Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng
bahasa persatoean, bahasa Indonesia*

Butir ketiga menjadi dasar pijakan atas pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dari segi pemaknaan, bahasa persatuan menjadi wahana pemersatu seluruh elemen bangsa. Artinya, bangsa Indonesia mempersatukan diri berdasarkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sementara itu, dari segi ejaan, teks Sumpah Pemuda masih menggunakan ejaan van Ophuijsen. Salah satu ciri bunyi bahasa ejaan van Ophuijsen, yaitu huruf *u* ditulis *oe*. Jadi, teks ikrar butir ketiga jika ditulis ulang dengan ejaan saat ini menjadi “... *Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.*”

**Gambar 4. Peserta Kongres Pemuda ke-II di Batavia,
27—28 Oktober 1928**



Berkat ikrar Sumpah Pemuda di atas, keberadaan atau eksistensi bahasa Indonesia telah diterima di masyarakat Indonesia pada saat itu. Menurut Kridalaksana (1991: 2), penerimaan itu menyebabkan orang Indonesia melihat bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia, dan bukan bangsa lain, sebagai bahasa yang lain daripada bahasa Melayu.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya tanggal 25—28 Juni 1938, diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia (KBI) I di Solo. KBI I diselenggarakan atas prakarsa perseorangan, jadi spontanitas sangat menandai suasananya. Dalam suratnya kepada redaksi *Majalah Pembinaan Bahasa Indonesia* pada tanggal 12 Oktober 1983, Mr. Soemanang mengatakan, pencetus KBI ialah Raden Mas Soedardjo Tjokrosisworo, seorang wartawan harian *Soeara Oemoem* Surabaya, yang pada waktu itu rajin sekali menciptakan istilah-istilah baru, dan sangat tidak puas dengan pemakaian bahasa dalam surat-surat kabar Cina (Kridalaksana, 1991).

Dalam suatu obrolan, Soedardjo Tjokrosisworo menanyakan kepada Soemanang bagaimana kalau diadakan Kongres Bahasa Indonesia. Soedardjo sanggup menggerakkan pengusaha-pengusaha dan tokoh-tokoh di Solo, dan Soemanang kemudian menyanggupi untuk menghubungi tokoh-tokoh dan kaum terpelajar di Jakarta. Mereka berdua berhasil meyakinkan para penulis yang tergabung dalam *Poedjangga Baroe* serta para jurnalis, guru, dan peminat-peminat lain. Jadi, pemrakarsa Kongres ini bukannya ahli bahasa profesional, melainkan wartawan pencinta bahasa Indonesia. Mereka kemudian menyusun suatu “Pengurus Komite” di Jakarta sebagai berikut:

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Ketua Kehormatan | : Prof. Dr. Hoesein Djajadiningrat |
| Ketua | : Dr. Poerbatjaraka |
| Wakil Ketua | : Mr. Amir Sjarifoeddin |

Penulis : Soemanang
Armijn Pane
Katja Soengkana
Bendahari¹ : Soegiarti, Mr.
Nj. Santoso-Maria Ulfah

KBI I di Solo diselenggarakan selama tiga hari, dari tanggal 25 Juni sampai dengan 27 Juni 1938. Berikut ini ialah susunan acara KBI I.

Sabtu, 25 Juni jam 8 sampai 11 malam

- a. Penyerahan kongres oleh Ketua Komite Penerimaan kepada Pengurus Kongres.
- b. Pembukaan dari ketua kongres Dr. Poerbatjaraka.
- c. Menerima ucapan selamat.

Minggu 26 Juni mulai jam 9 pagi

Rapat terbuka yang akan berbicara:

Sanoesi Pane : Sejarah Bahasa Indonesia
Ki Hadjar Dewantara : Bahasa Indonesia di dalam perguruan
H.B. Perdi (Hoofdbestuur : Bahasa Indonesia di dalam persuratkabaran
Persatuan Jurnalis Indonesia)
Mr. Amir Sjarifoeddin : Menyesuaikan kata dan faham asing
kepada Bahasa Indonesia
Mr. Muh. Yamin : Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan
dan bahasa kebudayaan Indonesia

Minggu 26 Juni pada malam harinya

Rapat tertutup buat memperdalam tentang soal-soal yang dikemukakan rapat terbuka, serta untuk menarik kesimpulan

Senin 27 Juni mulai jam 9 pagi

Rapat terbuka yang akan berbicara

¹ Kata "bendahari" merujuk pada kaidah bahasa Indonesia sistem Ejaan van Ophuijsen.

- T. Soekardjo Wirjopranoto : Bahasa Indonesia di dalam perwakilan
T. St. Takdir Alisjahbana : Pembaharuan bahasa dan usaha
mengaturinya
T. K. St. Pamoentjak : Tentang ejaan Bahasa Indonesia
T. Sanoesi Pane : Tentang Institut Bahasa Indonesia
T. M. Tabrani : Mencepatkan penyebaran Bahasa Indonesia
- Selama tanggal 28 Juni siang dan malamnya disediakan untuk rapat tertutup.

Salah satu hasil nyata ialah bahwa setelah selesai KBI I ini fraksi nasional dalam Volksraad yang dipimpin oleh M. Hoesni Thamrin memutuskan untuk memakai bahasa Indonesia dalam pandangan umum dewan tersebut—suatu hal yang menimbulkan reaksi negatif dari penjajah (Belanda). Surat kabar *Kebangoenan* yang dipimpin oleh Sanoesi Pane dalam terbitannya pada tanggal 22 Juni 1938 menyatakan bahwa penyelenggaraan KBI menandai bahwa “... *Bahasa Indonesia soedah sadar akan persatoeannja, boekan sadja dalam artian politik, akan tetapi dalam artian keboedajaan jang seloeas-loeasnja.*” Topik-topik KBI I, seperti pengindonesiaan kata asing, penyusunan tata bahasa, pembaruan ejaan, pemakaian bahasa dalam pers, dan pemakaian bahasa dalam undang-undang dipandang sangat relevan dengan perkembangan bahasa Indonesia saat itu dan masa-masa setelahnya (baca: fase bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara dan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional).

Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Resmi Negara

Fase bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara memiliki durasi waktu terlama, sejak tanggal 18 Agustus 1945 melalui penetapan Pasal 36 UUD 1945, hingga Seminar Politik Bahasa pada tahun 1999. Fase ini diawali dengan peristiwa Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sehari kemudian bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi

negara melalui Pasal 36 UUD 1945. Dengan begitu, terjadilah tanda pergeseran fase, awalnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara.

Kemudian muncullah Ejaan Suwandi pada tahun 1947. Menurut Sudaryanto (2017), ejaan Suwandi merupakan sistem ejaan Latin untuk bahasa Indonesia sesudah Proklamasi Kemerdekaan yang dimuat dalam Surat Keputusan Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, Mr. Soewandi, No. 264/Bhg. A tanggal 19 Maret 1947 yang merupakan penyederhanaan atas Ejaan van Ophuijsen, antara lain, adalah perubahan *oe* menjadi *u*. Sistem Ejaan Suwandi bernama lain Ejaan Republik. Disebut Ejaan Republik karena bangsa Indonesia saat itu tengah menunjukkan rasa nasionalisme yang tinggi, termasuk di dalam bahasa. Di mata mereka, Ejaan van Ophuijsen dianggap sebagai bagian dari pengaruh penjajah Belanda karena yang menyusun ejaan itu ialah orang Belanda, Charles Adriaan van Ophuijsen.

Selanjutnya, diadakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada tanggal 28 Oktober—2 November 1954. Berbeda dengan KBI I di Solo yang diselenggarakan atas prakarsa pribadi-pribadi, KBI II ini diselenggarakan oleh Pemerintah, yaitu Jawatan Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan². Untuk melaksanakan KBI II disusun Panitia Penyelenggara yang terdiri dari:

| | |
|--------------|----------------------|
| Ketua | : Sudarsana |
| Wakil Ketua | : Dr. Slametmuljana |
| Panitera I | : Mangatas Nasution |
| Panitera II | : Drs. W.J.B.F. Tooy |
| Panitera III | : Nur St. Iskandar |
| Anggota | : Pudjowijatno |

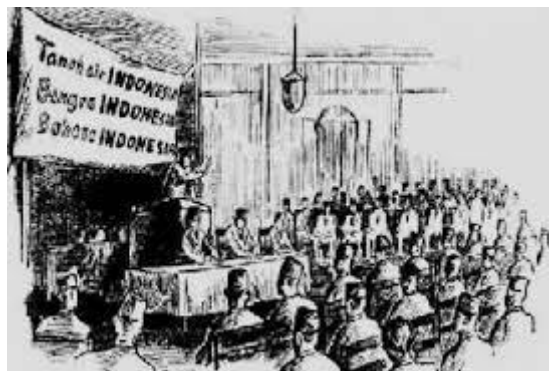
² Jawatan Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan setara dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) saat ini. Jabatan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud dijabat oleh Hilmar Farid.

Anggota : Amir Hamzah Nasution
Anggota : La Side

Menurut Kridalaksana (1991), keputusan KBI II tidak menjadi keputusan, melainkan Pemerintah Republik Indonesia benar-benar menyusun Panitia Pembaharuan Ejaan Bahasa Indonesia. Dengan sejarahnya yang panjang dari tahun 1956, hasil Panitia ini menjadi embrio Ejaan yang Disempurnakan (EYD) yang diresmikan pada tahun 1972. Memang diakui, ada keputusan KBI yang lain, tetapi yang paling meninggalkan bekas tentulah soal ejaan tersebut. Singkat kata, KBI II ada tindak lanjutnya, khususnya ke arah pembaruan ejaan, dari Ejaan Suwandi ke EYD.

Terkait EYD, Sudaryanto (2017) menjelaskan bahwa sistem ejaan bahasa Indonesia yang sebagian besar sama dengan sistem ejaan Malaysia, yang termuat dalam Surat Keputusan Presiden No. 57 tanggal 16 Agustus 1972 dan menjadi ejaan resmi bahasa Indonesia sampai tahun 2015. Perbedaannya dengan Ejaan Suwandi, antara lain, adalah huruf *j* menjadi *y*, *dj* menjadi *j*, *nj* menjadi *ny*, *ch* menjadi *kh*, *tj* menjadi *c*, dan *sj* menjadi *sy*.

Gambar 5. Ilustrasi Kongres Bahasa Indonesia II di Medan (1954)



Berikutnya, diselenggarakan dua acara kebahasaan secara berturut-turut yang menjadi embrio berdirinya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa-Badan Bahasa

(d/h Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa-Pusat Bahasa), yaitu Praseminar Politik Bahasa Nasional (1974) dan Seminar Politik Bahasa Nasional (1975). Halim (1984a & 1984b) mengungkapkan bahwa melalui dua acara kebahasaan tersebut, dicapai rumusan politik bahasa nasional, yaitu kebijakan nasional yang berisi perencanaan, pengarahannya, dan ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pengelolaan keseluruhan masalah bahasa. Hal serupa juga menjadi fokus perhatian pada Seminar Politik Bahasa tahun 1999 (Alwi & Sugono, 2011).

Berkat rumusan politik bahasa nasional itu, Pemerintah melalui Badan Bahasa dapat melakukan pengembangan bahasa dan pembinaan bahasa. Kridalaksana (2011) menjelaskan bahwa pengembangan bahasa adalah usaha untuk memperluas pemakaian bahasa di luar masyarakat bahasa yang bersangkutan melalui pengajaran bahasa, media massa, dan lain-lain. Sudaryanto (2017) menjelaskan bahwa pembinaan bahasa adalah upaya untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa, antara lain, mencakupi peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berbahasa yang dilakukan, misalnya melalui jalur pendidikan dan pasyarakatannya. Melalui kedua usaha itu, kelak posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara semakin kokoh.

Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional

Fase bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional merupakan kelanjutan dari fase sebelumnya, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Fase ini ditandai adanya Kongres Internasional IX Bahasa Indonesia di Jakarta, pada tanggal 28 Oktober—1 November 2008. Tema kongres tersebut adalah “Bahasa Indonesia Membentuk Insan Indonesia Cerdas Kompetitif di Atas Pondasi Peradaban Bangsa”. Penggunaan kata *internasional* pada nama kongres itu mengisyaratkan bahwa saatnya

bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Setahun kemudian, terbitlah Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang kian mendukung peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional (Pasal 44 ayat (1)).

Gambar 6. Publikasi Kongres Internasional IX Bahasa Indonesia



Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 berbunyi, “*Pemerintah meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.*” Melalui pasal tersebut, Pemerintah dalam hal ini Badan Bahasa, berupaya meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Salah satunya adalah melalui pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA). Kemudian, Badan Bahasa membuat unit baru guna melaksanakan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 bernama Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK).

Salah satu usaha yang telah dilakukan oleh PPSDK adalah penerbitan buku ajar BIPA *Sahabatku Indonesia* sebanyak 6 seri. Enam seri itu meliputi A1 (prapemula), A2 (pemula), B1 (pramadya), B2 (madya), C1 (pralanjut), dan C2 (lanjut). Melalui penerbitan buku ajar *Sahabatku Indonesia* itu, kelak pengajaran BIPA di Indonesia, khususnya Program Beasiswa Darmasiswa Republik Indonesia, memiliki standardisasi

buku ajar. Selain itu, PPSDK juga rutin mengirimkan guru-guru BIPA ke luar negeri, dengan masa tugas 4—5 bulan. Kelak, usaha-usaha PPSDK itu dapat mendorong terciptanya peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.

Fase bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sekurangnya sudah terwujud dengan fakta 45 negara telah mengajarkan bahasa Indonesia (Sudaryanto, 2015). Hingga tahun 2013 lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (saat itu) Mohamad Nuh telah dilakukan kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi atau universitas di dunia untuk mendirikan Pusat-Pusat Pembelajaran Bahasa Indonesia. Salah satunya adalah Pusat Pembelajaran Bahasa Indonesia di Universitas Bahasa-Bahasa Asing Beijing (Beijing Foreign Studies University) yang terletak di Kota Beijing, Republik Rakyat Tiongkok.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Bahasa Indonesia mengalami tiga fase perkembangan selama 81 tahun (1928—2009), yaitu (1) fase bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang ditandai adanya Ejaan van Ophuijsen dan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo, (2) fase bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara yang ditandai adanya UUD 1945 (Pasal 36), Kongres Bahasa Indonesia II di Medan, Ejaan Suwandi, Ejaan yang Disempurnakan, Praseminar Politik Bahasa Nasional (1974), Seminar Politik Bahasa Nasional (1975), Seminar Politik Bahasa (1999), dan (3) fase bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional yang ditandai adanya Kongres Internasional IX Bahasa Indonesia, UU Nomor 24 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, dan Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung penerbitan artikel ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. (ed.). (1984a). *Politik bahasa nasional 1*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Halim, A. (ed.). (1984b). *Politik bahasa nasional 2*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Jones, R. (ed.). (2008). *Loan-words in Indonesian and Malay*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerja sama dengan KITLV-Jakarta.
- Kridalaksana, H.. (1991). Pengantar tentang Pendekatan Historis dalam Kajian Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia dalam Harimurti Kridalaksana (ed.). *Masa lampau bahasa Indonesia: sebuah bunga rampai*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kridalaksana, H. (2011). *Kamus linguistik edisi keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Krippendorff, K. (1980). *Content analysis: An introduction to its methodology*. Beverly Hills-London: Sage Publications.
- Mulyati. (2015). *Terampil berbahasa Indonesia untuk perguruan tinggi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Paauw, S. (2009). One Land, One Nation, One Language: An Analysis of Indonesia's National Language Policy dalam H. Lehnert-LeHouillier dan A.B. Fine (ed.). *University of Rochester working papers in the language sciences*, 5(1), 2—16.
- Samuel, J. (2008). *Kasus ajaib bahasa Indonesia? Pemodelan kosakata dan politik peristilahan*. Terjemahan Dhany Saraswati Wardhany. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) bekerja sama dengan École française d'Extrême-Orient, Pusat Bahasa-Departemen Pendidikan Nasional, dan Forum Jakarta-Paris.
- Sudaryanto. (2015). Profil Tiga Jurusan Bahasa Indonesia di Tiongkok Selatan dan Barat Daya". *Bahastra*, Vol. XXXIV, Nomor 1, hlm 69—80.
- Sudaryanto. (2017). *Kamus umum bahasa dan ilmu bahasa*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Utami, S. R. (2017). Pembelajaran Aspek Tata Bahasa dalam Buku Pelajaran Bahasa Indonesia. *Aksis: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 1(2). 189-203. doi: doi.org/10.21009/AKSIS.010203